



Digital Receipt

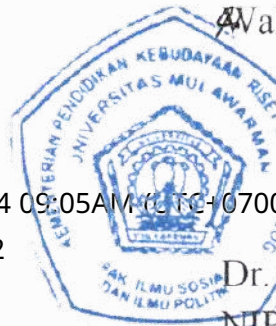
This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

26%

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Emilda Rahmi
Assignment title: JURNAL
Submission title: RESOLUSI KONFLIK ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN SA...
File name: Jurnal_skripsi_Emilda_Rahmi_2017.fix.doc
File size: 466.5K
Page count: 10
Word count: 3,100
Character count: 20,766
Submission date: 17-Sep-2024 09:05AM (UTC-0700)
Submission ID: 2452495632

SIMILARITY INDEX



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Rina Juwita, S.P., MHRIR
NIP.198104172005012001

eJurnal Pembangunan Sosial, 2024, 12 (3): 419-428
ISSN 0000-0000, eJurnal.ps.fkip.unmul.ac.id
© Copyright 2024

RESOLUSI KONFLIK ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT DENGAN MASYARAKAT ADAT DI DESA PASIR MAYANG

Emilda Rahmi¹, Sri Murtianti²

Abstrak

Konflik dianggap sebagai masalah sosial yang cukup sulit untuk diselesaikan karena dalam penanganan memerlukan pemahaman dan metode yang komprehensif. Pemahaman ini dirujuk pada pemahaman konflik dengan tidak melihat konflik yang sedang terjadi saja akan tetapi melihat dari awal terjadinya konflik dan sistem sosial yang ada di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui resolusi konflik antara perusahaan perkebunan sawit dengan masyarakat adat di desa Pasir mayang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjelaskan keterkaitan data-data sekunder berupa kebijakan UU, PP dan PERDA implementasinya dalam resolusi konflik antar komunitas, korporasi perkebunan dan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model resolusi konflik yang dilakukan oleh masyarakat adat Pasir Mayang yaitu melakukan beberapa kali mediasi dan diwadhahi oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang bersifat netral hingga mengirim perwakilan dari masyarakat adat untuk bertemu dengan menteri (Badan Usaha Milik Negara) BUMN. Dalam hal mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara masyarakat adat dan perwakilan PTPN XIII juga belum melahirkan keputusan yang jelas, harus saja dari pihak PTPN XIII menyampaikan bahwa keputusan terkait keberlanjutan dari kontrak (Hub Gana Usaha) BUMN PTPN XIII ini akan memberikan keputusan terbaik itu sampai bulan desember 2023.

Kata Kunci: Konflik, Resolusi Konflik, Perkebunan Sawit, Desa Pasir Mayang.

Pendahuluan

Pada awal tahun 2017, kabinet Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan upaya pemerataan, pengurangan kesenjangan, serta kebijakan mengenai perputaran aset dan akses masyarakat terhadap tanah. Selama tahun 2017, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berfokus pada pengakuan tanah adat dan akses permodalan rakyat. Pada konferensi Tenure yang diadakan pada Oktober 2017, Presiden secara langsung menyerahkan sembilan Surat Keputusan (SK) hutan adat dengan

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: emilda66@gmail.com

² Dosen Pembimbing, Dosen Praksi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.